

ABSTRAK

Inspektorat Provinsi Jambi sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam era reformasi birokrasi dan tuntutan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi semakin strategis, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Inspektorat Provinsi Jambi sebagai APIP dalam menindaklanjuti aduan ataupun rekomendasi penindaklanjutan serta kendala yang dihadapi Inspektorat Provinsi Jambi dalam menindaklanjuti aduan ataupun rekomendasi penindaklanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara lapangan (*field research*) di kantor Inspektorat Provinsi Jambi. Hasil penelitian didapatkan bahwa fungsi Inspektorat Provinsi Jambi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menindaklanjuti aduan masyarakat dan rekomendasi penindaklanjutan telah dijalankan secara sistematis dan mengacu pada regulasi. Proses tersebut mencakup tahapan verifikasi, klarifikasi, audit, serta pemantauan terhadap tindak lanjut oleh perangkat daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih kewenangan, kualitas laporan masyarakat yang rendah, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta lemahnya koordinasi dengan OPD. Kondisi ini menuntut adanya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sinergi antarinstansi, serta dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Inspektorat, Pengawasan, Pemerintah, Aduan, Rekomendasi.

ABSTRACT

The Jambi Provincial Inspectorate as part of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) has an important role in maintaining accountability, transparency, and effectiveness of regional government administration. In the era of bureaucratic reform and the demands of implementing good governance, it has become increasingly strategic, especially in preventing abuse of authority and improving the quality of public services. This study aims to examine the function of the Jambi Provincial Inspectorate as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in following up on public complaints and recommendations, as well as the challenges faced by the Inspectorate in carrying out these follow-ups. The research method used is empirical juridical with data collection techniques through field research interviews at the Jambi Provincial Inspectorate office. The results of the study indicate that the function of the Jambi Provincial Inspectorate as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in following up on public complaints and recommendations has been carried out systematically and in accordance with applicable regulations. The process includes stages of verification, clarification, audit, and monitoring of follow-up by regional apparatus. However, its implementation still faces various obstacles, such as overlapping authority, low quality of public reports, limited human resources and budget, and weak coordination with OPD. This condition requires strengthening institutional capacity, increasing synergy between agencies, and adequate policy and budget support so that the supervisory function can run more optimally.

Keywords: *Inspectorate, Supervision, Government, Complaints, Recommendations.*